Kementerian PPN/
Bappenas

ICCTF
Indonesia Climate Change Trust Fund

LAPORAN TRIWULAN 1 2023

LAPORAN TRIWULAN 1 2023

Kementerian PPN/ Bappenas

ICCTF
Indonesia Climate Change Trust Fund

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF 4

I. Rencana Kerja ICCTF Tahun 2022 5

II. Progres dan Capaian 10

A. Progres Proyek 11

1. COREMAP–CTI Asian Development Bank 11
2. Blue Finance 23
3. Blue Carbon 26

B. Program Strategis, Potensi Kerja Sama, dan Penggalangan Dana 30

C. Komunikasi, Outreach dan Kemitraan 38

III. Audit, Keuangan dan Operasional 40

A. Audit BPK Tahun 2023 41

B. Informasi Keuangan Periode Januari - Maret 2023 41

C. Operasional / Kesekretariatan 42

RINGKASAN **EKSEKUTIF**

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan Lembaga Wali Amanat Nasional (*National Trust Fund*) dalam bidang penanganan perubahan iklim. Sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, ICCTF mengelola dana APBN dan dana hibah dari mitra pembangunan dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca serta implementasi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kegiatan yang dilaksanakan ICCTF meliputi pengelolaan proyek, penggalangan dana, komunikasi dan *outreach* serta operasional Satker. Dalam hal pengelolaan proyek, ICCTF membagi proyek-proyek yang dikelola berdasarkan *thematic windows* ke dalam empat fokus area, yaitu i) *Land-based Mitigation*; ii) *Adaptation and Resilience*; iii) *Energy*, dan; iv) *Marine-based*. Sejalan dengan peningkatan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan laut dan sumber dayanya, saat ini ICCTF menitikberatkan fokus pada tema program berbasis kelautan (*Marine-based*) sejak tahun 2020.

Pada awal tahun 2023 ini ICCTF dalam proses penyelesaian proyek COREMAP – CTI Asian Development Bank (ADB). Kegiatan yang sudah dilaksanakan berada di 3 lokasi di KKPD Nusa Penida, Provinsi Bali; TPK Gili Balu, dan TWP Gili Matra, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada periode ini telah dilaksanakan pemeriksaan asset dan proses BAST.

Program selanjutnya yang sedang dikerjakan oleh ICCTF adalah Blue Carbon dengan AFD. Dokumen Financing Agreement untuk proyek *Support for the Integration of Blue Carbon Ecosystem in Indonesia's Biodiversity and Climate Policies* telah ditandatangani pada periode triwulan sebelumnya dan saat ini ICCTF telah menyelesaikan proses pengadaan tenaga ahli. Selanjutnya ICCTF akan bersiap untuk proses persiapan implementasi proyek.

Kemudian untuk *Blue Finance dan Aquaculture,* ICCTF masih melanjutkan konsolidasi dengan berbagi *stakeholder.* Terkait Blue Finance, dua dokumen telah selesai disusun pada periode sebelumnya yaitu *Blue Finance Policy Note* dan *Blue Finance Instruments Development Guideline*. Pada periode ini Konsultan ADB untuk Blue Finance melakukan kunjungan lapang ke Raja Ampat. Ada pun terkait *Aquaculture* masih dalam tahap negosiasi terhadap *agreement*.

Hasil kegiatan diwartakan dalam website ICCTF dan melalui media sosial ICCTF. Selain itu kerjasama penyebaran informasi kegiatan lapangan juga menggunakan media sosial yang dilakukan bersama-sama dengan Mitra Pelaksana. Untuk semakin meningkatkan kulaitas dalam penjangkauan dan komunikasi, pada periode ini ICCTF juga melaksanakan pengadaan konsultan untuk tim komunikasi.

1 RENCANA KERJA ICCTF TAHUN 2023

Q1
JAN – MAR

Pengelolaan Proyek

Kegiatan Pendukung Hibah Existing

- Pendampingan Hibah COREMAP-CTI ADB
- Kegiatan Pendukung Hibah AFD Blue Carbon Project

Kegiatan Pendukung Hibah Pipeline

- Kegiatan Dukungan Hibah Blue Finance
- Kegiatan Pendukung Hibah ADB: Aquaculture

Kegiatan Audit

- Pendampingan Audit Proyek COREMAP-CTI Asian Development Bank
- Pendampingan Audit Proyek COREMAP-CTI World Bank

Dukungan Operasional

Pelaksanaan Rapat Koordinasi

- Rapat Koordinasi Operasional Satker ICCTF
- Rapat Penyusunan Laporan

Dukungan Personil ICCTF

- Konsultan & Jasa Lainnya

Q2
APR – JUN

Pengelolaan Proyek

Kegiatan Pendukung Hibah Existing

- Pendampingan Hibah COREMAP-CTI ADB
- Kegiatan Pendukung Hibah AFD Blue Carbon Project

Kegiatan Pendukung Hibah Pipeline

- Koordinasi Dana Pendukung Hibah AFD Ocean Energy Study: EBT dari Laut
- Kegiatan Dukungan Hibah Blue Finance
- Kegiatan Pendukung Hibah ADB: Aquaculture

Kegiatan Audit

- Pendampingan Audit Proyek COREMAP-CTI Asian Development Bank
- Pendampingan Audit Proyek COREMAP-CTI World Bank

Perencanaan Dampak Climate Change sebagai Input untuk RPJMN 2025 - 2029

- Kegiatan Perencanaan Neraca Sumber Daya

Q3
JUL - SEP

Pengelolaan Proyek

- **Kegiatan Pendukung Hibah Existing**
- Pendampingan Hibah COREMAP-CTI ADB
- Kegiatan Pendukung Hibah AFD Blue Carbon Project
- **Kegiatan Pendukung Hibah Pipeline**
- Koordinasi Dana Pendukung Hibah AFD Ocean Energy Study: EBT dari Laut
- Kegiatan Dukungan Hibah Blue Finance
- Kegiatan Pendukung Hibah ADB: Aquaculture
- **Perencanaan Dampak Climate Change sebagai input untuk RPJMN 2025 - 2029**
- Kegiatan Perencanaan Neraca Sumber Daya

Kegiatan Komunikasi dan Penggalangan Dana

- **Kegiatan Komunikasi Outreach**
- Partisipasi dalam Event Perubahan Iklim
- Produksi Publikasi Komunikasi
- **Penggalangan Dana Internasional**
- UN 2023 Water Conference – New York

Dukungan Operasional

- **Pelaksanaan Rapat Koordinasi**
- Rapat Koordinasi Operasional Satker ICCTF
- Rapat MWA
- Rapat Penyusunan Laporan
- **Dukungan Personil ICCTF**
- Konsultan & Jasa Lainnya

Q4
OCT - DEC

Pengelolaan Proyek

- **Kegiatan Pendukung Hibah Existing**
- Kegiatan Pendukung Hibah AFD Blue Carbon Project
- **Kegiatan Pendukung Hibah Pipeline**
- Koordinasi Dana Pendukung Hibah AFD Ocean Energy Study: EBT dari Laut
- Kegiatan Dukungan Hibah Blue Finance
- Kegiatan Pendukung Hibah ADB: Aquaculture
- **Perencanaan Dampak Climate Change sebagai input untuk RPJMN 2025 - 2029**
- Kegiatan Perencanaan Neraca Sumber Daya

Kegiatan Komunikasi dan Penggalangan Dana

- **Kegiatan Komunikasi Outreach**
- Produksi Publikasi Komunikasi
- **Penggalangan Dana Internasional**
- 2023 UN Climate Change Conference (UNFCCC COP 28)

Dukungan Operasional

- **Pelaksanaan Rapat Koordinasi**
- Rapat Koordinasi Operasional Satker ICCTF
- Rapat Penyusunan Laporan
- **Dukungan Personil ICCTF**
- Konsultan & Jasa Lainnya

2 PROGRES dan **CAPAIAN**

A | PROGRESS PROYEK

1. COREMAP–CTI ASIAN DEVELOPMENT BANK

Kegiatan PIU COREMAP - CTI ADB

a. Rapat Tim Pemeriksa ASET COREMAP-CTI ADB

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2023 bertempat di Hotel Pullman, Jakarta. Agenda kegiatan ini adalah pembahasan rencana serah terima asset proyek COREMAP-CTI. Kesimpulan dan tindak lanjut dari kegiatan ini, antara lain sebagai berikut:

- Pemeriksaan akan mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan oleh ICCTF
- Tim pemeriksa diharapkan dapat menyebar saat berada di lapangan sehingga dalam 1 hari bisa selesai di 1 lokasi
- Tim pemeriksa dari IBAU jika diperlukan bisa lebih dari 1 orang
- Pengalaman peninjauan lokasi sebelumnya, beberapa barang ada yang tidak dapat dilihat secara fisik, sehingga diperlukan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh mitra bahwa barang tersebut telah sesuai
- Pelaksanaaan pemeriksaan diusulkan antara tanggal 15 Februari - 15 Maret 2023

Gambar 1. Pembahasan serah terima aset oleh peserta rapat

b. Monitoring pelaksanaan pembangunan Menara Pengamatan Burung dan Jalur Mangrove di Nusa Ceningan, dan Pos Pengawasan di Nusa Penida.

Kunjungan Lapang ini dilaksanakan tanggal 21 dan 22 Januari 2023. Agenda dari kunjungan lapang ini adalah pemeriksaan pekerjaan terlaksana, sedang dilaksanakan, dan tidak akan dilaksanakan serta pemeriksaan volume pekerjaan terpasang. Hasil dari kunjungan lapang ini adalah sbagai berikut:

- Infratruktur di Nusa Penida meliputi Tracking Mangrove, Menara Pemantau Burung dan Pos Pengawasan Batununggul
- Pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan akan diselesaikan oleh Kontraktor. Volume pekerjaan yang tidak cukup waktu akan dihitung sebagai pekerjaan kurang.
- Pekerjaan yang tidak sesuai dengan DED akan dilakukan penyesuaian dan diperhitungkan sebagai pekerjaan tambah/kurang
- Perhitungan pekerjaan tambah/kurang berdasarkan perhitungan bersama dengan Konsultan Pengawas

c. Rapat Pembahasan Hasil Cek Pembangunan Infrastruktur dan Rencana Kegiatan Pemantauan Pembangunan di Nusa Penida, Bali

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023 secara online melalui aplikasi Zoom. Agenda dari kegiatan ini adalah pembahasan hasil pengecekan pembangunan infrastruktur di Nusa Penida sebagai masukan pengecekan PPK. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Perlu dimonitor lebih lanjut perbaikan-perbaikan dan penyelesaian yang harus diselesaikan oleh para mitra terkait sebelum tanggal 31 Januari 2023
- Monitoring dan evaluasi pembangunan akan dilaksanakan kembali dengan keterlibatan PPK pada taggal 28 Januari 2023

d. Pembahasan CTC

Pertemuan ini terdiri dari beberapa rangkaian pertemuan dan tindak lanjut yang dilaksanakan beberapa kali di Bulan Januari dan Februari 2023. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2023. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan isu yang terjadi terkait CTC, penyelesaian administrasi BAST, dan Persiapan Revisi Top-Up Hibah Luar Negri. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Terkait denda, ADB tidak ada sistem denda, sehingga dalam addendum kontrak dengan CTC bisa dibuat deduction of payment yang mengurangi nilai kontrak CTC
- Terkait perubahan efisiensi pembangunan, bisa dilaporkan ke ADB dengan narasi pengembalian sisa belanja dibayarkan di muka
- Pencatatan BAST final pada aplikasi SAKTI

Gambar 2. Penyampaian substansi oleh Narasumber

- COREMAP-CTI ADB diperpanjang hingga Agustus 2023, NOL ADB telah didapatkan pada tanggal 6 Januari 2023. Direktur KP telah menyurat kepada Ortala
- ADB telah mengirimkan NOL namun Bappenas tetap perlu mengajukan proses realokasi category. Saat ini Direktur KP telah mengirimkan Nota Dinas kepada plt. Deputi KSDA, plt. Deputi KSDA telah mengirimkan Nota Dinas kepada Sesmen, kemudian Sesmen telah melanjutkan ke Kemenkeu

e. Rapat Penyusunan Jadwal AWP Project COREMAP-CTI ADB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2023. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan jadwal AWP project COREEMAP-CTI ADB. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Ada 2 training untuk community di NTB meliputi *marine tourism* dan *fisheries management* pada tanggal 13 – 18 Maret 2023. Site Coordinator sudah mulai mengidentifikasi peserta pelatihan (kelompok masyarakat/pemda)
- Training 13 MPA dilakukan di tanggal 11-14 Juli 2023 di Mataram. MPA konsultan bertugas April-Agustus
- Kegiatan training Jepang akan dilakukan 14-21 Mei 2023
- Kegiatan training MSC akan dilakukan di Bali (jadwal masih menunggu konfirmasi)
- Pengecekan Asset dan BAST akan dilaksanakan pada tanggal 27-3 Maret 2023 untuk Gili Balu dan Gili Matra, serta tanggal 3-5 April 2023 untuk Nusa Penida
- Media visit / expose, Exit strategy, Lesson learned, dan Project mission akan dilaksanakan pada rentang waktu Juni-Juli 2023

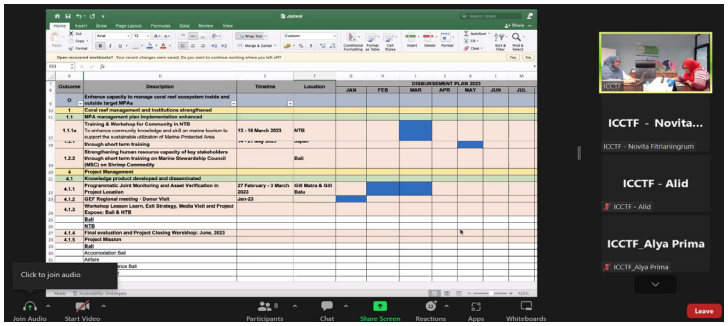

Gambar 3. Pembahasan AWP COREMAP-CTI ADB

f. Rapat Realokasi Grant Strategy COREMAP-CTI ADB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 bertempat di Hotel Pullman, Jakarta. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan rencana realokasi dana program COREMAP-CTI ADB. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- COREMAP-CTI ADB sudah melalui beberapa amandemen, di mana usulan grant agreement amendment memuat 2 hal yaitu Bappenas sebagai PIU grant dan untuk Bappenas hibahnya senilai $5.2 juta
- Pada 27 Januari 2023, masih ada perpanjangan dan realokasi. Sudah dituangkan di surat ADB terkait persetujuan AWP
- Penyelesaian BAST akan dilaksanakan di bulan Maret
- Revisi realokasi kategori hibah ini sudah berjalan dan dua proses yang pemerintah akan lakukan yaitu:
    1. Surat deputi pendanaan kepada kemenkeu akan disampaikan minggu ini dengan justifikasi dan explanatory motes
    2. Surat ke ADB akan diproses setelah terima surat dari bagian pendanaan
- Terkait dengan revisi anggaran ke DJA akan dikirim minggu ini, diharapkan di akhir Februari juga DIPA sudah aktif

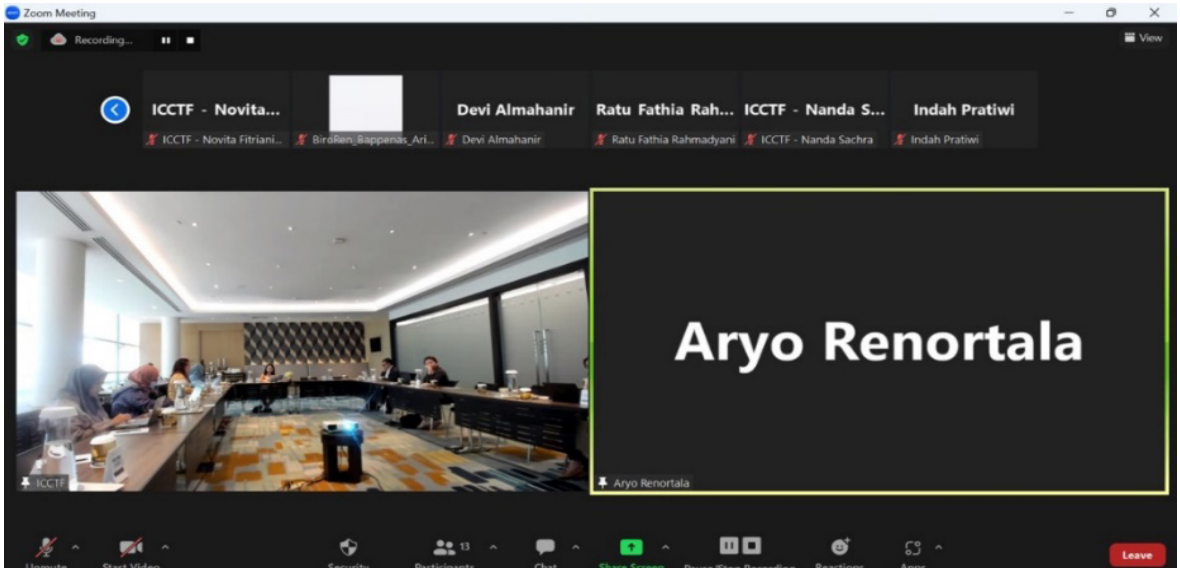

Gambar 4. Pembahasan realokasi grant strategy COREMAP-CTI ADB

g. Rapat Persiapan Audit BPK

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 bertempat di Hotel Pullman, Jakarta. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan persiapan audit BPK 2023 dan serah terima asset COREMAP-CTI. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Permintaan audit BPK 2022 Per 17 Februari 2023 meliputi terkait aset infrastruktur dan perlengkapan, Konsultan dan Jasa Lainnya, Laporan Keuangan, Belanja Bantuan Pemerintah, dan penyelesaian temuan tahun sebelumnya
- Antisipasi persiapan pemeriksaan BPK Tahun 2022:
    1. Untuk tahun 2022, mulai bulan Mei 2022, ICCTF sudah menerapkan pembayaran taksi bandara dengan at cost. Untuk bulan Januari – April 2022, ICCTF masih memberlakukan 80%
    2. Pemeriksaan Aset dan infrastruktur di lokasi proyek. BPK sudah meminta list pekerjaan fisik di lapangan, dan sudah disampaikan ke BPK daftarnya dengan clearance dari IBAU
    3. Pembiayaan kegiatan oleh Mitra Pelaksana untuk kegiatan bersama. Hal ini sudah dituangkan dalam ToR Kegiatan Mitra dan sudah dipastikan tidak ada *double payment* antara mitra pelaksana dengan ICCTF
- Rencana kunjungan BAST di Nusa Penida: 5 - 11 Maret 2023
- Rencana kunjungan BAST di Gili Matra: 12 - 15 Maret 2023
- Minimal 1 orang mitra pelaksana harus ada perwakilan di lapangan
- Untuk hibah WB sebelum Mei akan ada kunjungan aset di bulan Maret/April untuk memastikan kondisi aset di lapangan. Pembiayaan akan dari ICCTF
- Kunjungan BPK ke Raja Ampat dengan rute: Sorong, Yensawai, Waisai, Mutus dan Miosarar, direncanakan pada bulan Mei 2023
- Kunjungan BPK ke NTT dengan rute: Kupang, Nuca molas, nangalili direncanakan pada bulan Mei 2023

Gambar 5. Pembahasan rencana audit BPK

h. Rapat Persiapan Pemeriksaan Aset COREMAP-CTI ADB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2023 melalui aplikasi Zoom. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan persiapan kegiatan pemeriksaan aset COREMAP-CTI ADB di Nusa Penida, Gili Matra dan Gili Balu. Kesimpulan dan tindak lanjut dari kegiatan ini, antara lain sebagai berikut:

- Pemeriksa aset akan dibagi menjadi beberapa tim agar waktu pemeriksaan efisien
- Form pemeriksaan asset akan menjadi dasar tim pemeriksa dalam pemeriksaan asset yang akan menjadi lampiran berita acara pemeriksaan asset
- Setiap asset akan difoto. Semua yang tertera di dokumen pengadaan akan diperiksa satu per satu untuk kuantitas dan fungsinya. Tim punya waktu 10-30 menit untuk pengecekan
- Briefing awal untuk lokasi harus jelas menunjukan rute, transportasi, dll
- Pelu dikonfirmasi siapa saja mitra penerima manfaat yang akan hadir

i. Pemeriksaan Asset COREMAP-CTI ADB di Nusa Penida, Gili Mtra dan Gili Balu

Kunjungan Lapang ini dilaksanakan dari tanggal 8 Maret sampai dengan 18 Maret 2023, berlokasi di Nusa Penida – Bali dan serta Gili Matra dan Gili Balu – Nusa Tenggara Barat. Agenda Kunjungan Lapang ini adalah pemeriksaan asset dan penerima manfaat dari proyek COREMAP-CTI ADB. Hasil dari Kunjungan Lapang ini adalah sebagai berikut:

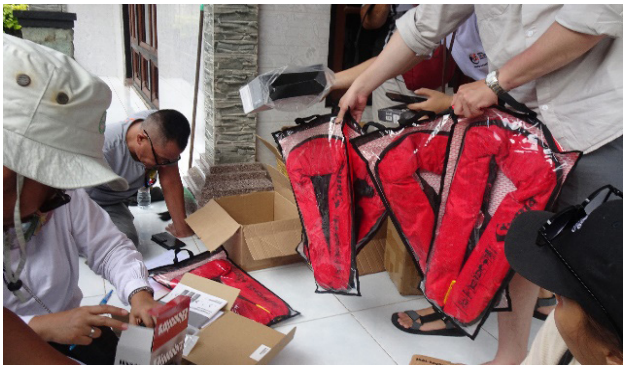

Gambar 6. Pengecekan asset Pokmaswas di Nusa Penida

Nusa Penida

Pengecekan asset di Nusa Penida dilakukan pada tanggal 8-11 Maret 2022, dengan total jumlah tim pemeriksa asset sebanyak 32 orang, dan jumlah penerima manfaat asset sebanyak 9 kelompok/ instansi. Kegiatan ini dilakukan dengan pembagian 2 tim pemeriksa asset dan dilakukan di lokasi/tempat penerima asset yaitu di Nusa Lembongan, Nusa Ceningan dan Nusa Penida (Desa Batununggul, Desa Suana, dan Desa Ped).

Asset yang diperiksa meliputi: Pondok Informasi Wisata, perlengkapan Pondok Informasi, Tourist Management System, papan informasi digital, speed boat pengawasan, Pos Pengawasan dan perlengkapan Pos Pengawasan (penerima manfaat UPTD KKP Nusa Penida); mangrove tracking dan bird watching (penerima manfaat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung); peralatan pokmaswas (penerima manfaat Pokmaswas Baruna Jaya dan Gili Bhuana); alat pengolah rumput laut (penerima manfaat Poklahsar Bodong Lestari, Sandu Care, dan Sari Segara); dan media restorasi terumbu karang (penerima manfaat Kelompok Nusa Pulau).

Gili Matra

Pengecekan asset di Gili Matra dilakukan pada tanggal 12-15 Maret 2023, dengan total jumlah tim pemeriksa asset sebanyak 31 Orang, dan jumlah penerima manfaat asset sebanyak 18 kelompok/ instansi. Kegiatan ini dilakukan di Teluk Nara, Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air.

Asset yang diperiksa meliputi: Pondok Informasi, peralatan Pondok Informasi, VMS, dan papan informasi digital (penerima manfaat Dinas Perhubungan Kab. Lombok Utara); Pos Pengawasan (penerima manfaat BPKAD Kabupaten Lombok Utara); tagging penyu dan satellite telemetry (penerima manfaat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB); mooring buoy (penerima manfaat Kelompok Meno Lestari); alat selam (penerima manfaat Pokdarwis Tramena); peralatan pokmaswas dan speed boat pengawasan (penerima manfaat Pokmaswas Tramena); alat tangkap berkelanjutan dan speed boat bantuan pengawasan (Kelompok Nelayan NAGITA, Meno Bahari 1, dan Cinta Damai 1); bibit karang dan media restorasi karang (Kelompok Restorasi Terumbu Karang); dan alat pengolahan perikanan (Poklahsar Bunda Meno, Lanter Gili, dan Putri Bahari).

Gambar 7. Asset Pos Pengawasan (kiri) dan Pondok Informasi (kanan) di Gili Matra

Gili Balu

Pengecekan asset di Gili Balu dilakukan pada tanggal 15–18 Maret 2023, dengan total jumlah tim pemeriksa asset sebanyak 22 Orang, dan jumlah penerima manfaat asset sebanyak 19 kelompok/ instansi. Kegiatan ini dilakukan di Desa Poto Tano, Desa Sagena, Desa Tuananga, dan Desa Sepakek.

Aset yang diperiksa meliputi: Ecotourism Center dan perlengkapan Ecotourism Center (penerima manfaat Dinas Pariwisata KSB); MPA information center dan mooring buoy (penerima manfaat UPT BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat); Menara Pengawas Pulau Namo dan Pulau Paserang (penerima manfaat CDK/DKP Provinsi NTB); speed boat pengawasan (Pokmaswas Buah Lawah dan Pasir Putih); alat pengawasan (Pokmaswas Buah Lawah, Pasir Putih, Tanjung Prapat dan Liang Kuru);; alat tangkap berkelanjutan (Kelompok Nelayan Jaring Tasik, Jaring Mairo, Jaring Insang, dan Pancing Ulur); alat pengolahan ikan (Poklahsar Karya Tani, Persatuan Pasir Putih, Sepakek Barokah, Pasir Putih, KWT Pelita, Karya Makmur, Tano Jaya, dan Jaring Mairo).

Gambar 8. Pengecekan Asset Menara Pengawas di Pulau Namo (kiri) dan Pulau Paserang (kanan) di Gili Balu

j. Diskusi Persiapan PCR COREMAP-CTI (termasuk GEF terminal evaluation report)

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 melalui aplikasi Zoom. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan persiapan penyusunan PCR COREMAP-CTI. Kesimpulan dan tindak lanjut dari kegiatan ini, antara lain sebagai berikut:

- PCR adalah suatu kewajiban di ADB. Di PAM, pemerintah juga ada kewajiban membuat PCR namun tidak ada template khusus pemerintah dan ada substansi-substansi yang perlu dilengkapi
- GEF punya template sendiri untuk Terminal Evaluation Report (TER) yang tidak ada di PCR ADB. Akan mengikuti template ADB dan ditambahkan dengan poin-poin khusus GEF
- Untuk ADB terdapat 4 rating scale dan ada indicator untuk disiapkan (relevance, effectiveness, efficiency and sustainability). Untuk GEF terdapat 6 rating scale namun tidak tercantum informasi indikator
- PCR KKP tahun 2014 sudah dinyatakan disbursement penggunaan Loan dan Grant (blend). Pemisahan tidak terlalu strict antara Loan dan Grant karena kegiatan tidak terlalu terpisah. Pembiayaan hingga tahun 2016 dilakukan dengan dua sumber. Setelah re-structure dan Executing Agency berpindah, pembiayaan hanya satu
- Budget dari ADB untuk PCR adalah USD 15,000 yang bisa digunakan untuk consultant. Tahun lalu ada 2 sumber budget dari Manila namun tahun ini tidak ada. Untuk national consultant sebagai pendamping international consultant belum ada tambahan budget. International consultant sebagai penulis PCR saja
- Pengembalian dari CTC bisa masuk ke budget consulting services, mungkin bisa digunakan. Perkiraan 220-230 ribu available namun belum yakin bisa mencukupi.
- Setelah PCR akan ada mission penutupan

k. Pembahasan PCR COREMAP-CTI ADB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023 melalui aplikasi Zoom. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan PCR dengan James Berdach (JIM). Kesimpulan dan tindak lanjut dari kegiatan ini, antara lain sebagai berikut:

- ADB akan membuat laporan penyelesaian tetapi tidak ada kewajiban untuk mempublikasikannya
- Penutupan COREMAP-CTI untuk evaluasi terminal ADB dan GEF akan memiliki jenis laporan yang berbeda
- Proyek ini akan ditutup pada bulan Agustus berdasarkan kontrak. Akan lebih baik sekitar bulan Juni – Juli sudah tersedia draf laporannya

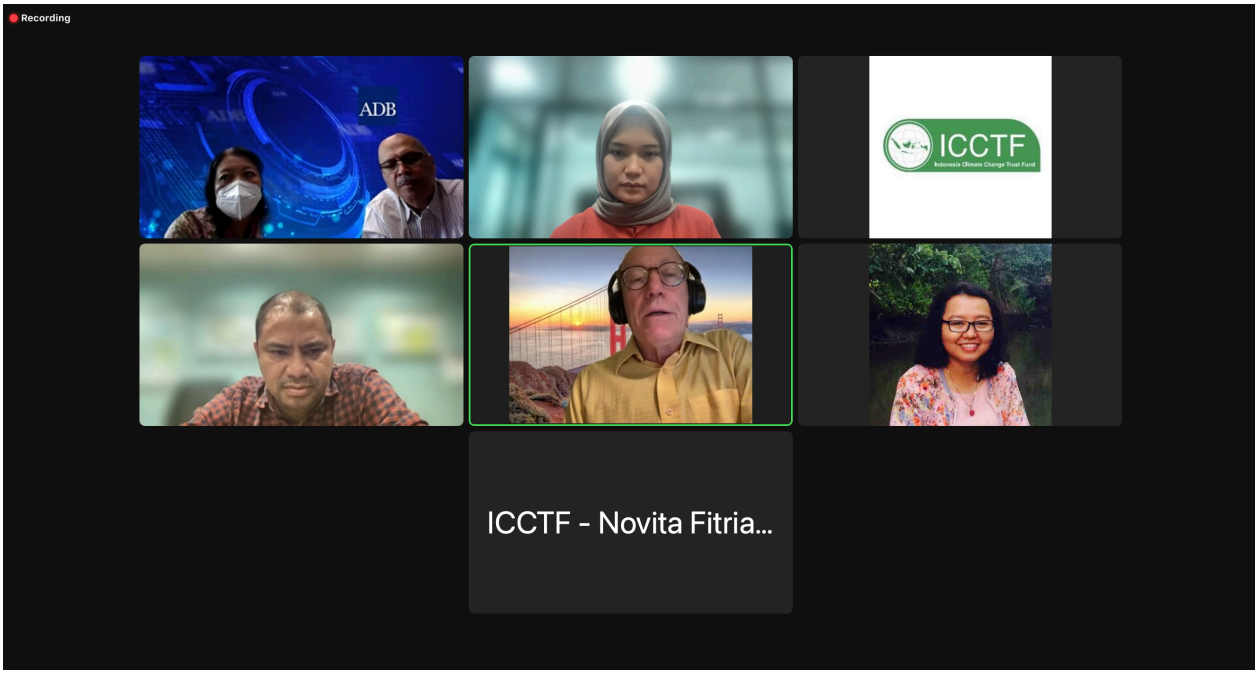

Gambar 9. Diskusi PCR COREMAP-CTI ADB dengan James Berdach

Nusa Penida (Grant Package 1 dan Grant Package 4)

Highlight pencapaian sampai dengan bulan Maret 2023 adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Kegiatan Tambah Kurang Pembangunan Pondok Informasi

Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu hasil evaluasi kunjungan tim technical specialist yang telah dilakukan di bulan Januari 2023, tim kontraktor GP1 telah sepakat untuk melakukan tambah kurang sesuai kesepakatan dengan tim ICCTF dan PPK. Kegiatan tambah kurang yang dilakukan diantaranya:

- Pemasangan talang air sudah selesai, keempat sisinya, (100%)
- Pemasangan arde dan 3 unit camera cctv sudah selesai (100%)
- Pembersihan gedung UPTD sudah selesai dibersihkan
- Pembersihan area kerja sudah selesai dibersihkan
- Pemasangan papan nama bangunan akan diselesaikan menjelang serah terima asset

b. Pembahasan persiapan kunjungan BAST dan BPK

Sebagai persiapan terhadap rencana kegiatan pemeriksaan aset COREMAP CTI ADB, mitra pelaksana dan penerima manfaat saling berkoordinasi untuk mengecek kembali Infrastruktur MPA dan Ekowisata Skala kecil meliputi: Pusat Informasi Kawasan Konservasi; Pondok Informasi Ekowisata, Jalur Mangrove Tracking, Bird Watching Tower, Tourist (Visitor) Management System, dan Mooring Buoys.

Tabel 1. Daftar pengadaan dan penerima manfaat COREMAP-CTI ADB di Nusa Penida

Nusa Penida		
Paket	**Item Pengadaan**	**Penerima manfaat**
GP1	Pondok Informasi Wisata	UPTD KKP Nusa Penida
	Perlengkapan Pondok Informasi	UPTD KKP Nusa Penida
	Tourist Management System	UPTD KKP Nusa Penida
	Papan Informasi Digital	UPTD KKP Nusa Penida
GP4	1 Unit speed boat pengawasan	UPTD KKP Nusa Penida
	Peralatan Pokmaswas	• Pokmaswas Baruna Jaya, Desa Suana • Pokmaswas Gili Bhuana, Desa Lembongan
	Perlengkapan Pos Pengawasan	UPTD KKP Nusa Penida
	Alat pengolah rumput laut	• Poklahsar Bodong Lestari, Desa Ped • Poklahsar Sandu Care, Desa Lembongan • Poklahsar Sari Segara, Desa Suana
	Media Restorasi Terumbu Karang	Kelompok Nusa Pulau, Desa Ped
	Papan Informasi (sign board)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung
	Pos Pengawasan	UPTD KKP Nusa Penida
	Mangrove Tracking	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung
	Bird watching tower	

Gili Matra (Grant Package 2 dan Grant Package 5)

Highlight pencapaian sampai dengan bulan Maret 2023 adalah sebagai berikut:

a. **Pembahasan persiapan kunjungan BAST dan BPK**

Sebagai persiapan terhadap rencana kegiatan pemeriksaan aset COREMAP CTI ADB, mitra pelaksana dan penerima manfaat saling berkoordinasi untuk mengecek kembali sarana dan prasarana pendukung livelihood meliputi: Pusat Informasi Kawasan Konservasi, Pondok Informasi Ekowisata, Tourist (Visitor) Management System, dan Mooring Buoys. Ada pun untuk Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Ekosistem meliputi: media transplantasi terumbu karang, bibit karang, dan bibit mangrove.

Tabel 2. Daftar pengadaan dan penerima manfaat COREMAP-CTI ADB di Gili Matra

Gili Matra		
Paket	**Item Pengadaan**	**Penerima manfaat**
GP2	Pondok Informasi	Dinas Perhubungan Kab. Lombok Utara
	VMS	Dinas Perhubungan Kab. Lombok Utara
	Peralatan Pondok Informasi	Dinas Perhubungan Kab. Lombok Utara
	Papan Informasi Digital	Dinas Perhubungan Kab. Lombok Utara
	Mooring Buoy	Kelompok Meno Lestari, Desa Gili Indah
	Alat Selam	Pokdarwis Tramena, Desa Gili Indah
	Tagging Penyu dan Satellite Telemetry	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
GP5	Pos Pengawasan	BPKAD Kabupaten Lombok Utara
	Peralatan Pokmaswas	Pokmaswas Tramena, Desa Gili Indah
	Speed boat pengawasan	Pokmaswas Tramena, Desa Gili Indah
	Alat tangkap berkelanjutan	• Kelompok Nelayan NAGITA, Desa Gili Indah • Kelompok Nelayan Meno Bahari 1, Desa Gili Indah • Kelompok Nelayan Cinta Damai 1, Desa Gili Indah
	Speed boat bantuan pengawasan	• Kelompok Nelayan NAGITA, Desa Gili Indah • Kelompok Nelayan Meno Bahari 1, Desa Gili Indah • Kelompok Nelayan Cinta Damai 1, Desa Gili Indah
	Bibit Karang	Kelompok Restorasi Terumbu Karang, Desa Gili Indah
	Media Restorasi Karang	Kelompok Restorasi Terumbu Karang, Desa Gili Indah
	Alat Pengolahan Perikanan	• Poklahsar Bunda Meno, Desa Gili Indah • Poklahsar Lanter Gili, Desa Gili Indah • Poklahsar Putri Bahari, Desa Gili Indah

Gili Balu (Grant Package 3 dan Grant Package 6)

Highlight pencapaian sampai dengan bulan Maret 2023 adalah sebagai berikut:

a. **Pembahasan persiapan kunjungan BAST dan BPK**

Sebagai persiapan terhadap rencana kegiatan pemeriksaan aset COREMAP CTI ADB, mitra pelaksana dan penerima manfaat saling berkoordinasi untuk mengecek kembali sarana dan prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi: Kapal Pengawasan, Pos Pengawas, Menara Pengawas, dan Peralatan Operasional Pokmasawas

Tabel 3. Daftar pengadaan dan penerima manfaat COREMAP-CTI ADB di Gili Balu

Gili Balu		
Paket	**Item Pengadaan**	**Penerima manfaat**
GP3	Ecotourism Center	Dinas Pariwisata KSB
	Perlengkapan Ecotourism Center	Dinas Pariwisata KSB
	Perlengkapan kantor CDK (MPA information center)	UPT BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat
	Mooring Buoy	UPT BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat
	Speed boat pengawasan	• Pokmaswas Buah Lawah, Desa Poto Tano • Pokmaswas Pasir Putih, Desa Kiantar
	Alat pengawasan	• Pokmaswas Pasir Putih, Desa Kiantar • Pokmaswas Buah Lawah, Desa Poto Tano • Pokmaswas Tanjung Prapat, Desa Kiantar • Pokmaswas Liang Kuru, Desa Senayan
	Menara Pengawas Pulau Namo	CDK/DKP Prov. NTB
	Menara Pengawas Pulau Paserang	CDK/DKP Prov. NTB
	Perlengkapan Menara Pengawas	CDK/DKP Prov. NTB
GP6	Alat tangkap berkelanjutan	• Kelompok Nelayan Jaring Tasik, Desa Poto Tano • Kelompok Nelayan Jaring Mairo, Desa Poto Tano • Kelompok Nelayan Jaring Insang, Desa Poto Tano • Kelompok Nelayan Pancing Ulur, Desa Poto Tano
	Alat pengolahan ikan	• Poklahsar Karya Tani, Desa Tuananga • Poklahsar Persatuan Pasir Putih, Desa Poto Tano • Poklahsar Sepakek Barokah, Desa Senayan • Poklahsar Pasir Putih, Desa Poto Tano • Poklahsar KWT Pelita, Desa Poto Tano • Poklahsar Karya Makmur, Desa Kiantar • Poklahsar Tano Jaya, Desa Poto Tano • Poklahsar Jaring Mairo, Desa Poto Tano

2. BLUE FINANCE

a. Undangan Pembahasan DFIL LAUTRA

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 melalui aplikasi Zoom. Agenda kegiatan ini adalah pembahasan draft *Disbursement and Financial Information Letter* (DFIL). Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- KKP dan ICCTF berkomitmen untuk meminta dana advance sesuai kebutuhan
- Pengajuan Advance dilakukan setiap 6 bulan
- Initial deposit WB disiapkan dalam form 1D, ada beberapa dokumen
- Reksus antara ICCTF dan KKP berbeda.
- Direct payment: anggarannya masuk di DIPA ICCTF. WB akan langsung bayarkan

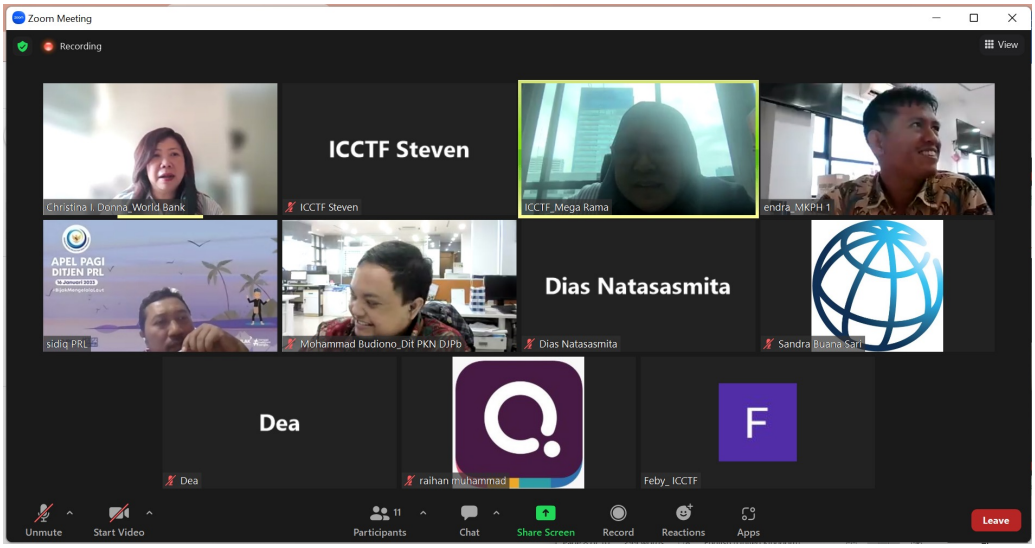

Gambar 10. Pembahasan DFIL LAUTRA

b. Undangan Pembahasan PAD dan ESCP LUTRA

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2023 di ruang meeting World Bank. Agenda keiatan ini adalah pembahasan PAD dan ESCP. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Readiness Criteria sudah di-update oleh KKP, sedangkan proses Daftar Kegiatan (DK) sudah disampaikan kepada Menteri.
- Dokumen Enviroment Social Commitment Plan (ECSP) sudah dicermati dan dikonsultasikan kepada semua tim PIC.
- Dokumen ESCP sudah tidak ada masukan atau perbaikan lagi (final), dan sudah dapat di proses lebih lanjut

- Beberapa masukan terkait dengan Project Appraisal Document (PAD) sudah diterima dari tim PIC. Ada perubahan wording dan juga typo yang dapat di perbaiki.
- Cut off date: Masukan terkait dengan PAD terakhir pada tanggal 20 Januari 2023
- Proses negosiasi yang akan dilakukan di akhir Januari 2023
- Board date akan dilakukan sekitar di akhir Februari
- Selain persiapan untuk persetujuan PAD, perlu dimulai untuk penyusunan *key activities*
- Beberapa kegiatan prioritas yang perlu dilakukan oleh masing masing PIU adalah penyusunan ToR untuk konsultan yang akan di hire. Selain itu juga perlu disiapkan finalisasi SK Team

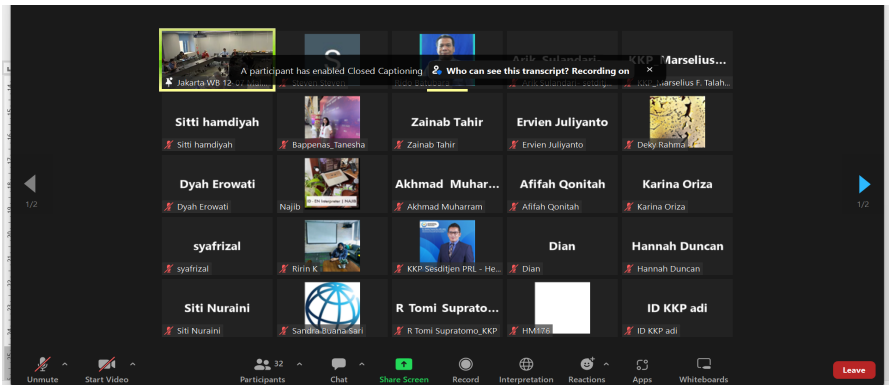

Gambar 11. Pembahasan PAD dan ESCP LAUTRA

c. Undangan Rapat Persiapan Perundingan PHLN LAUTRA

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023 bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta. Agenda kegiatan ini adalah penyusunan daftar tanggapan (*matrix to negotiate*) atas draft *loan agreement* dan *grant agreement* kegiatan LAUTRA. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Loan agreement dan grant agreement telah disusun dan disepakati
- Masih membuka kesempatan untuk masukan terhadap agreement, bisa menghubungi Kemenkeu paling lambat sampai hari Jumat jam 12 siang
- Hasil diskusi dan masukan lewat email dan akan di susun daftar tanggapannya
- Negosiasi akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2023
- Board approval akan dilaksanaan pada Maret 2023
- Penandatanganan *loan agreement* dan *grant agreement* antara Maret-April 2023

Gambar 12. Jalannya diskusi oleh peserta rapat

d. Rapat Negosiasi LAUTRA

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 secara online. Agenda kegiatan ini adalah pembahasan Legal Agreement dari Loan dan Grant LAUTRA. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Loan Grant Agreement dan Loan Agreement bersifat *Mutatis mutandis* sehingga poin-poin umum yang tercantum di Loan Agreement juga berlaku di Grant Agreement, sehingga tidak perlu dituliskan Kembali
- Perpanjangan akan tergantung kebijakan dari Problue atau OMC, berdasarkan performa dan status pelaksanaan proyek, amandemen untuk perpanjangann dimungkinkan untuk dilakukan
- Kemungkinan amandemen bisa dimasukan ke dalam Minutes of agreement, karena WB tidak bisa terikat secara legal sebagai komitmen dalam agreement
- Loan Agreement dan Grant Agreement sudah disetujui. Board approval diperkitrakan pada akhir bulan Maret 2023

3. BLUE CARBON

a. **Diskusi Kegiatan Blue Carbon dengan YAPEKA**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2023 melalui aplikasi Zoom. Agenda kegiatan ini adalah diskusi dengan YAPEKA terkait kegiatan blue carbon di Sulawesi Utara. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Sudah ada beberapa kegiatan terkait blue carbon lamun yang dilakukan oleh YAPEKA di Likupang Sulawesi Utara
- Pekerjaan yang dilakukan YAPEKA meliputi: (i) *research*, yakni melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir terkait dengan blue carbon di Lamun; (ii) *policy*, yakni mengintegrasikan lamun ke policy framework; (iii) *bussiness models (ecotourism & spirulina farming)*; dan (iv) *communication*, yakni advocating nilai ekosistem lamun (*ecosystem services*)
- Terdapat 6 titik di 2 lokasi (Minahasa Utara dan Sangihe) yang menjadi sampling YAPEKA untuk blue carbon seagrass
- YAPEKA bisa sharing ke ICCTF terkait dengan metode dan lokasi yang menjadi titik sampling mereka
- Program YAPEKA terkait Blue Carbon Seagrass berakhir di tahun 2023

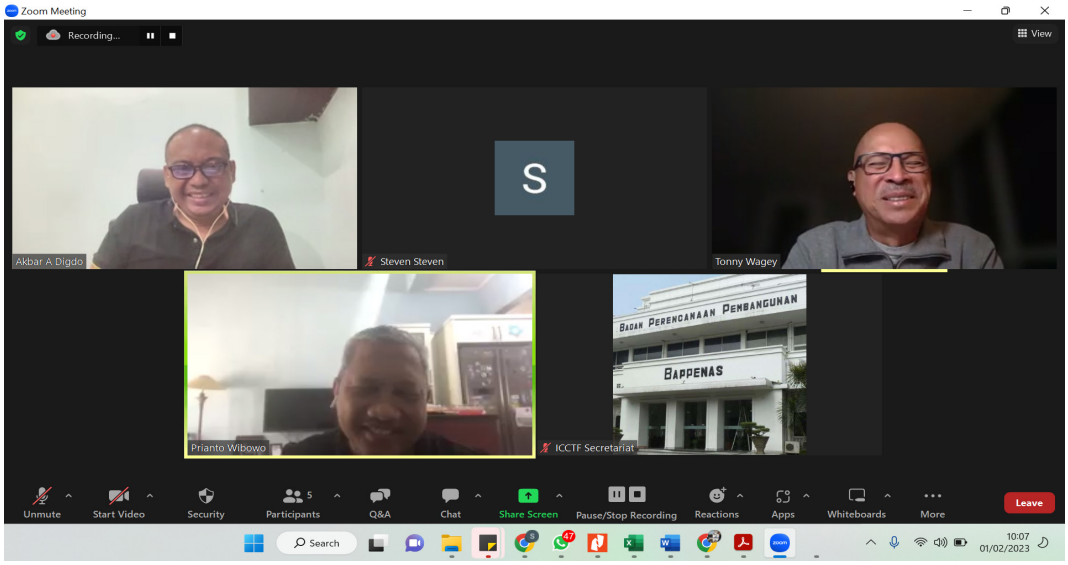

Gambar 13. Diskusi blue carbon dengan YAPEKA

b. **Rapat Koordinasi Training Blue Carbon**

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2023 secara online. Agenda kegiatan ini adalah pembahasan rencana penyelenggaraan pelatihan blue carbon di Indonesia. Hasil dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- Blue Praxis Australia berencana untuk mengadakan pelatihan tentang Blue Carbon di Indonesia, Pelatihan akan dilakukan selama 5 hari, dengan 2 hari tambahan sebagai Training of trainer.
- Sasaran untuk pelatihan adalah adalah pemangku kepentingan di sektor karbon biru di Indonesia
- Rencana untuk jumlah peserta pelatihan dalah sekitar 30-40 orang
- Lokasi Pelatihan sebaiknya dilaksanakan di Bali mengingat akses penerbangan yang berimbang dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur
- Pelatihan Blue Carbon akan dilaksanakan pada awal Mei 2023

c. **Undangan Kemenkomarves: Workshop Strategi Pengelolaan Karbon Biru di Indonesia**

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 23-25 Februari 2023 bertempat di Hotel Mirah, Bogor. Agenda kegiatan ini antara lain pembahasan kebijakan dan implementasi karbon biru di Indonesia dan sinkronisasi kegiatan dengan K/L terkait program karbon biru. Hasil dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- Target penurunan emisi dalam NDC Indonesia saat ini sebesar 29% menjadi 31.8% (dengan kemampuan sendiri) dan 41% menjadi 43.2% (dengan bantuan internasional). Kontribusi terbesar dari energi, kehutanan, dan pertanian.
- Mempertimbangkan peran penting mangrove bagi mata pencaharian, ketahanan dan iklim, pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan Program Rehabilitasi Mangrove Nasional, yang merupakan prioritas Presiden Indonesia dan bertujuan untuk merehabilitasi 600.000 ha mangrove yang terdegradasi hingga tahun 2024. Program Rehabilitasi Mangrove Nasional ini salah satunya didukung oleh Bank Dunia melalui program *Mangroves for Coastal Resilience* (M4CR).
- Program M4CR bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan mangroves dan mata pencaharian masyarakat setempat di lanskap pesisir terpilih. Program ini tediri dari 4 komponen, yaitu:
    1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Mangrove
    2. Rehabilitasi dan Pengelolaan Lanskap Mangrove secara Berkelanjutan
    3. Meningkatkan Peluang Mata Pencaharian Masyarakat yang Tinggal di Sekitar Mangrove
    4. Manajemen Program
- Dana M4CR akan dikelola oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPDLH) yang bekerjasama dengan KLHK, BRGM, Kemenkomarinves dan keterlibatan aktif pemerintah daerah. Proyek ini akan dilaksanakan di empat provinsi: Riau, Sumtera Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

- Berdasarkan hasil dari inisiatif profil emisi BCI-Lamun dalam workshop yang diselenggarakan oleh PKSPL-IPB, luas terlapor mangrove 3.364.060 ha, dan luas terlapor lamun 293,464 ha
- Diperlukan standar metode pengukuran karbon lamun yang ditetapkan setidaknya oleh Menteri atau SNI
- KKP memiliki mandat sebagai Penanggung Jawab Nasional isu Oceans pada perubahan iklim. KKP dalam penyusunan prototype blue carbon network melalui INSAN TERANG LAUTRA. KKP juga dalam proses menjadi Wali Data Lamun, yang sebelumnya ada BRIN
- Kemenkomarves saat ini telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Forum Ekonomi Dunia (World Economy Forum/WEF) pada bulan Januari 2023 tentang pembentukan National Blue Carbon Action Partnership (NBCAP) dalam rangka mendukung ambisi pemerintah Indonesia untuk memulihkan dan konservasi ekosistem blue carbon di Indonesia. Perlu adanya koordinasi lanjutan dengan Bappenas untuk mendiskusikan antara NBCAP dengan Indonesia Blue Carbon Strategy Framework (IBCSF)

Gambar 14. Pemaparan proyek M4CR oleh Narasumber

d. **Undangan Workshop Unlocking Indonesia's Carbon Financing Potential Opportunities and Challenges for Accessing Carbon Markets and Results-Based Finance.**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2023 melalui aplikasi zoom. Agenda pertemuan ini adalah diskusi terkait potensi pendanaan karbon. Beberapa poin penting hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- KKP telah ditunjuk KLHK dan Kemenkomarves sebagai penanggung jawab isu kelautan terkait perubahan iklim. Perpres 98 tahun 2021: Blue Carbon akan dilaksanakan KKP dengan catatan Marine Sector belum menjadi bagian dari NDC
- KKP dalam proses mengajukan untuk menjadi wali data lamun yang sebelumnya ada di LIPI atau BRIN

- Tantangan dalam Mengelola Ekosistem Karbon Biru:
  1. Degradasi Ekosistem Karbon Biru (mangrove, padang lamun);
  2. Perlunya kebijakan untuk memandu pelaksanaan pengarusutamaan karbon biru di daerah;
  3. Sinergi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam implementasi karbon biru belum optimal;
  4. Data dan informasi tentang ekosistem karbon biru belum diperbarui;
  5. Metode standar untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan secara nasional untuk membangun baseline karbon biru belum diterapkan;
  6. Pendanaan yang terbatas untuk program konservasi dan restorasi Ekosistem Karbon Biru
- Tantangan carbon credit issuance:
  1. Project document development (12-24 bulan) carbon standard (VCS, Gold);
  2. External validation (2-6 bulan) Third Party auditor (VVB);
  3. Project registration (1-6 bulan) national registry, carbon standard registry;
  4. External verification (3-6 bulan) third party auditor (VVB);
  5. Credit issuance (1-2 bulan) carbon standard (national) transaction registry
- Carbon Pricing Instrument: Cap and trade dan crediting mechanism
- Carbon Finance: Voluntary CM dan Compliance CM

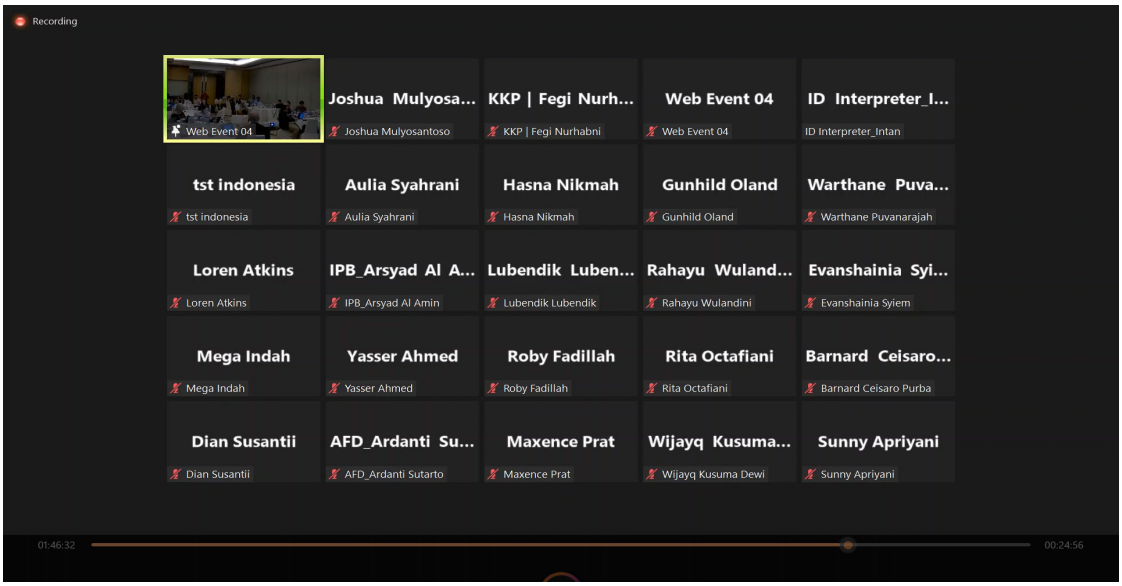

Gambar 15. Diskusi bersama peserta di dalam workshop

2 Program Strategis dan Penggalangan Dana (*fundraising*)

a. Undangan GEF-8 Asia and Pacific Regional Workshop di Bali

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 melalui aplikasi Zoom. Agenda pertemuan ini adalah sharing session mengenai Financing loss and Damage. Hasil dari kegiatan ini adalah:

- Sepanjang kegiatan ini ditampilkan beberapa paparan berikut:
  1. Lesson learned from the Philippine People's Survival Fund (PSF) oleh Kairos Dela Cruz
  2. Global Shield Against Climate Risks oleh Martin Kipping
  3. Financing Loss and Damage oleh Shikha Bhasin (CEEW)
- Secara umum seluruh paparan membahas pentingnya pendanaan yang berkelanjutan
- Sebagai tindak lanjut dibutuhkan:
  1. Data dan pengetahuan yang senantiasa up to date dan akurat tentang dampak perubahan dan mendorong bukti ilmiah untuk menuntut pendanaan yang akurat dan berbasis bukti
  2. Mengembangkan indeks kerentanan global untuk memetakan kerentanan kritis dan merencanakan strategi untuk membangun ketahanan masyarakat dan bangsa
  3. Mengembangkan dan memiliki bersama teknologi hemat biaya untuk membangun infrastruktur kesiapsiagaan darurat baru dan meningkatkan sistem yang ada

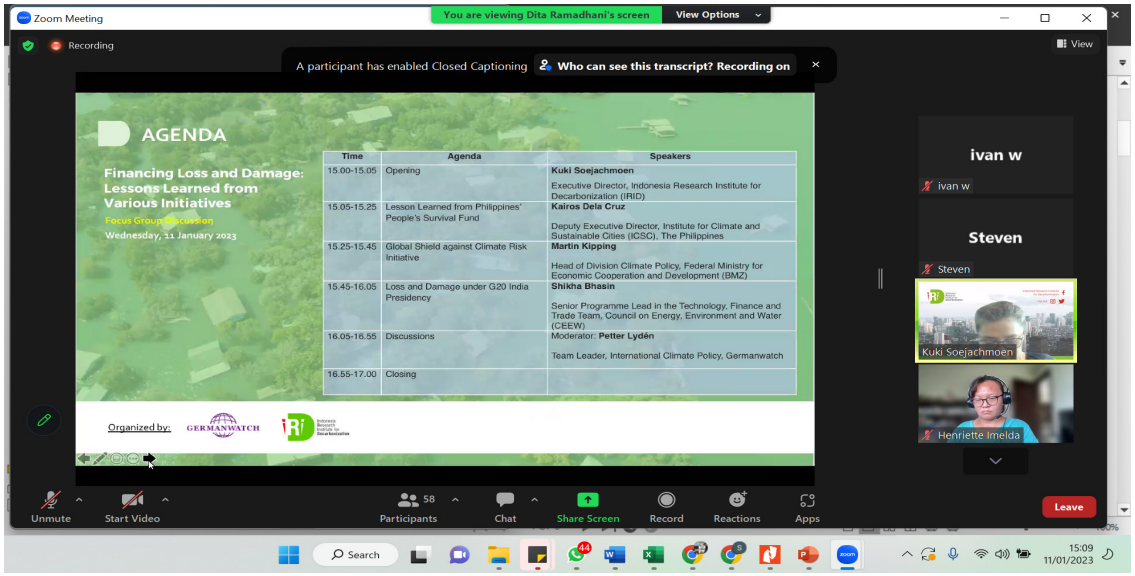

Gambar 16. Penjelasan agenda dalam FGD

b. Undangan GEF-8 Asia and Pacific Regional Workshop di Bali

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10-11 Januari 2023 di Bali. Kegiatan ini merupakan sharing session mengenai implementasi program GEF melalui *breakout room* dan *learning station* yang bertempat di masing-masing booth exhibitor GEF partner. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan perencanaan untuk GEF-8 di regional Asia Pasifik dengan menekankan pada program yang terintegrasi. Berikut adadalah beberapa poin penting hasil dari kegiatan tersebut:

- Focal Area GEF:

1. *Biodiversity*

   Goal : *Globally significant biodiversity conserved, sustainably used, and restored.*

   Objectives : *Improve conservation, sustainable use and restoration of natural ecosystem, effectively implement the Cartagena and Nagoya protocols, increase mobilization of domestic resources of biodiversity.*

2. *Climate change mitigation*

   Goal : *Support developing countries to make transformational shifts towards net-zero GHG emissions and climate resilience development pathways*

   Objectives : *Innovation, technology transfer, and enabling policies for mitigation options with systemic impacts, enabling conditions to mainstream mitigation concerns into sustainable development strategies.*

3. *Chemicals and waste*

   Goal : *Prevent pollution from harmful chemicals and waste particularly POPs and Mercury.*

   Objectives : *Policy reform to cleaner chemistry and eliminate existing waste. Preventing a future build up of harmful chemicals and waste in the environment. Eliminating harmful chemicals and waste in current waste streams and that are stockpiled in existing infrastructure and processes.*

4. *International waters*

   Goal : *Supporting nations in Transboundary cooperation in shared marine and freshwater ecosystem through 3 step process (Assess ecological & socioeconomic conditions; Agree on a regional strategic action program (SAP); and Implement the SAP)*

   Objectives : *Support Large Marine Ecosystems to accelerate Blue Economic Development, advance management in the Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ, enhance water security in share freshwater ecosystems.*

5. *Land Degradation*

   Goal : *To avoid, reduce, and reverse land degradation, desertification and mitigate the effects of drought.*

   Objectives : *Sustainable land management, Landscape restoration, Address Desertification, Land Degradation and Drought, particularly in drylands, Improve the enabling policy and institutional framework for LDN.*

- Sumber daya GEF:
  1. Siklus pengisian ulang 4 tahun dari 1 Juli 2022 hingga 30 Juni 2026.
  2. $5,33 miliar yang dijanjikan oleh 39 negara donor
  3. Tingkat alokasi STAR negara dirilis 1 Juli 2022
- Tinjauan operasional dan kebijakan melalui berbagi pengetahuan dan manajemen, peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran, serta kemitraan dan kerja sama:
  1. Kesetaraan gender dan pelibatan pemangku kepentingan
  2. Standar minimal untuk instansi
  3. Desain proyek dan program
  4. Pemantauan dan pelaporan portofolio
- GEF mendorong pertukaran di antara OFPs/Agencies berdasarkan pengalaman Indonesia mengenai manfaat utama bagi negara, tantangan, dan pelajaran yang dipetik dari proyek.

Gambar 17. Foto bersama di depan booth ICCTF

c. Undangan GEF National Dialogue Indonesia dan Monitoring and Evaluation Infrastruktur di Nusa Penida, Bali

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16-19 Januari 2023 di Bali. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami lebih jauh peluang pendanaan GEF-8 di Indonesia serta menperkenalkan proyek COREMAP CTI ADB ke mitra GEF. Ada pun kegiatan monev yang dilakukan setelahnya, bertujuan untuk memastikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan teknis perencanaan yang telah disiapkan (DED) dan dapat selesai pada tenggat waktu yang telah ditentukan. Hasil dari kunjungan lapangan ini antara lain:

- Indonesia mendapatkan alokasi melalui *System for Transparent Allocation of Resources* (STAR) sebesar 103.65 Juta USD
- Alokasi tersebut akan terbagi dalam tiga Focal Area, yaitu keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan degradasi lahan.
- Komitmen Indonesia dalam melakukan berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi tujuan konvensi yang telah diratifikasi sangat tinggi dan optimis ke depan Indonesia akan semakin baik dalam pengelolaan lingkungan. Indonesia sudah menjalankan program konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan degradasi lahan, penghapusan penggunaan bahan perusak ozon, dan pengendalian dampak perubahan iklim.
- Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengintegrasikan dan mempercepat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemanfaatan dana lingkungan hidup yang terintegrasi, serta memperkuat aksi bersama, baik pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta dan mitra pembangunan.

Gambar 18. Diskusi bersama Bupati Klungkung di Menara Burung

- Peserta pertemuan NDI GEF yang menghadiri booth COREMAP diperkirakan sekitar 30 orang/hari, sebagian besar menanyakan tentang lokasi proyek COREMAP dan perencanaan implementasi COREMAP kedepan. Sebagian besar peserta berasal dari pemerintahan (Bappeda bali, sekda kalimantan timur, dll) dan NGOs.
- Dalam kegiatan monev di Nusa Penida, Bupati Klungkung berjanji akan melanjutkan pemanfaatan mangrove tracking dan bird watching dengan baik dan siap melakukan serah terima di bulan Februari 2023. Bupati Klungkung juga berpesan kepada kepala Desa Ceningan untuk membuat BUMDES yang akan mengelola mangrove tracking & bird watching serta fasilitas pembangunan lainnya di Ceningan. Selanjutnya Bappenas menghimbau terkait kegiatan pemanfaatan sarana prasarana yang telah diberikan proyek untuk digunakan dengan baik dan persiapan serah terima asset yang akan dilakukan di bulan februari 2023.

d. Undangan Kick-Off KLHS RPJPN 2025-2045: Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2023 di Ruang DH, Kementerian PPN/ Bappenas. Agenda kegiatan ini adalah Kick-Off untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPN 2025-2045. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain, sebagai berikut:

- KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis. Hasil KLHS memberikan rekomendasi terhadap penyusunan KRP di dalam penyusunan RPJPN 2025-2045. Dasar hukum penyelenggaraannya adalah PP no.46 Tahun 2016 dan Permen LHK no. 69 Tahun 2017
- Analisis komprehensif melalui KLHS:
    1. Memastikan daya dukung dan daya tampung dapat mendukung target pembangunan
    2. Memastikan isu-isu pembangunan dapat diatasi untuk mencapai visi dan sasaran Indonesia Emas 2045
- Alur penyusunan RPJPN: Rancangan teknokratik diharapkan selesai pada Bulan Februari 2023 dan Musrenbang akan dilakukan pada bulan Maret 2023. RPJPN akan dibahas di DPR pada bulan Juli 2023 dan diharapkan selesai di Bulan September 2023
- Tindak lanjut:
    1. Pembahasan lanjutan per sektor
    0. Pembahasan dan penyepakatan skenario kebijakan lintas sektor
    0. Integrasi rekomendasi kebijakan KLHS kedalam RPJPN

Gambar 19. Pembukan oleh Plt. Deputi KSDA Bappenas

e. Undangan BPDLH: Finalisasi Penyusunan Dokumen Program Srategis

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2023 secara online melalui aplikasi Microsoft Team. Agenda pertemuan ini adalah finalisasi penyusunan dokumen program strategis BPDLH. Poin-poin penting hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- BPDLH telah menyusun Dokumen Program Strategis yang memuat lima program tematik, yaitu: 1) Pengelolaan Hutan, Lahan dan Ekosistem Berkelanjutan, 2) Energi Terbarukan yang Terjangkau, 3) Pengelolaan Limbah, Pencemaran dan Sirkular Ekonomi, 4) Ketahanan Pangan, Air dan Kesehatan, 5) Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan Risiko Bencana.Workshop hari ini mendiskusikan program tematik pertama
- Target penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan sebesar 140 juta ton CO_2
- Untuk mendukung FOLU Net Sink 2030 telah disiapkan database SIGAP dan kegiatan-kegiatan program prioritas yang bisa menjadi pendukung implementasinya
- Saat ini sudah tersedia windows untuk mangrove, namun belum ada windows utuk lamun. Disulkan untuk dimasukkan karena juga termasuk dalam salah satu ekosistem blue carbon
- windows untuk lamun, ocean accounting, dan sebagainya dapat dicantolkan pada ecosystem services. Namun pendanaannya tergantung donor.
- Dana yang dibutuhkan untuk FOLU ini sangat besar dibandingkan yang disediakan oleh APBN. Untuk mengisi gap tersebut BPDLH memetakan program-program strategis yang ada
- Draft dokumen program strategis ini belum menjelaskan bagaimana skema penyaluran dana BPDLH. Akan dibahas dalam pertemuan lain

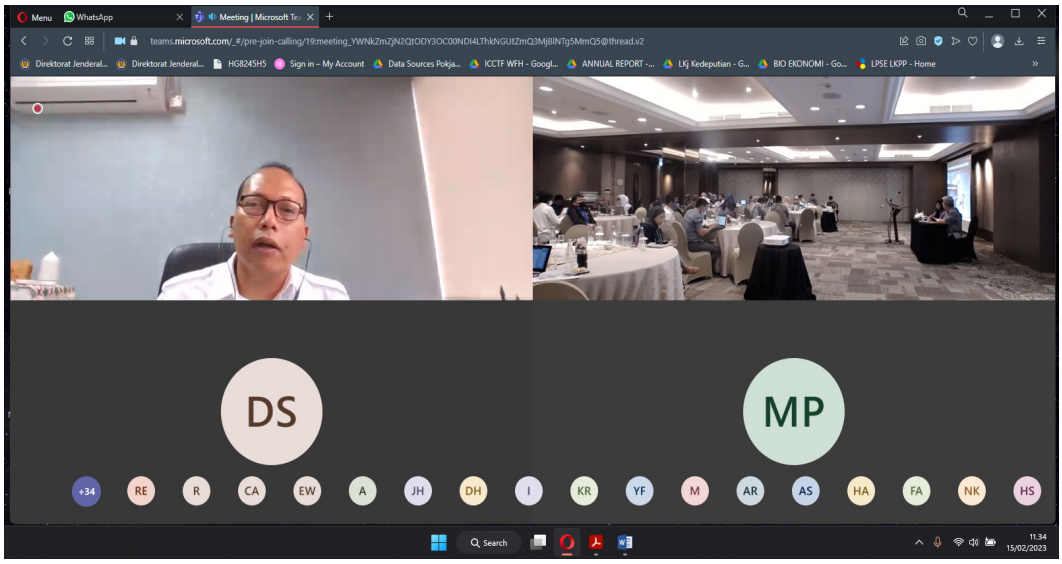

Gambar 20. Diskusi dokumen Program Strategis BPDLH

f. Rapat Aquaculture

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023 secara online. Agenda pertemuan ini terkait dengan rencana proyek ISLME. Beberapa poin-poin penting hasil dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- Konsultan project finance dari ADB akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan budget costing
- Salah satu isu yang perlu dipertimbangkan dalam budgetin adalah angka untuk konsultan saat ini terlalu tinggi, tidak sesuai dengan Imkindo
- Untuk mencapai kesepakatan perlu untuk mereview dan address semua komentar GEF
- Letter of Co-Financing akan ditahan sampai budgeting bisa disetujui antar pihak.

g. Rapat dengan Global Factor

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023 di ruang rapat ICCTF. Agenda pertemuan ini berupa pengenalan antar lembaga. Beberapa poin-poin penting hasil dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- Global Factor adalah private company yang berkembang di masa pandemi yang bergerak dalam berbagai area penting meliputi perubahan iklim, mitigasi, inventarisasi GRK, Jejak karbon, kemitraan di lapangan, adaptasi, pasar karbon
- Di Asia Tenggara, Global Factor sebelumnya sudah pernah bekerjasama dengan Thailand dan Indonesia (proyek Low Carbon di Bitung)

h. Rapat dengan Tetra Tech

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023 secara online. Agenda pertemuan ini adalah diskusi dengan Tetra Tech. Beberapa poin-poin penting hasil dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- Tetra Tech saat ini mencoba mencari informasi iklim yang digunakan sebagai basis program di tingkat lokal
- Di proyek energi terbaharukan sebelumnya, Tetra Tech memiliki proyek di Kupang dan berkaitan dengan orang-orang yang tinggal di daerah pesisir kota
- Kedepan Tetra Tech berencana untuk memiliki proyek bekerjasama dengan USAID

i. Webinar Ocean Account

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2023 secara online. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan mengenai Ocean Account. Beberapa poin-poin penting hasil dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- Setiap pemangku kepentingan memiliki sebagian besar atribut untuk mendukung Ocean Account berdasarkan kapasitasnya
- Banyak sumber daya potensial yang dapat digunakan untuk mengembangkan Ocean Account dengan meningkatkan atribut masing-masing pemangku kepentingan
- Ocean Account yang berhasil akan mendukung pembangunan laut yang berkelanjutan, memungkinkan lebih banyak sumber daya, mendukung integrasi data, dan reformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola yang baik
- Untuk menjawab tantangan untuk implementasi Ocean Account di Indonesia pihak pembuat kebijakan sudah memiliki kemauan yang cukup tinggi untuk implementasi Ocean Account in Indonesia, maka seharusnya legitimasi yang dimilki oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan tantangan tersebut, karena resources yang tersedia cukup banyak

3 Komunikasi, Outreach dan Kemitraan

Berbagai kegiatan komunikasi dan publikasi yang terkait dengan penanggulangan perubahan iklim bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai dampak perubahan iklim, sekaligus mensosialisasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Bappenas pada satker ICCTF dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca melalui Pengelolaan Ekosistem Pesisir Prioritas.

ICCTF saat ini lebih banyak melakukan strategi pendekatan komunikasi secara digital karena dinilai lebih interaktif dan *realtime* melalui pengelolaan website (https://www.icctf.or.id/) dan beberapa akun media sosial yang terdiri dari: Instagram (@icctfofficial); Twitter (@ICCTF_ID); Facebook (IndonesiaClimateChangeTrustFund) dan Youtube (ICCTF Official). ICCTF senantiasa berupaya untuk selalu mengoptimalkan kanal informasi yang tersedia tersebut dengan mempublikasikan informasi dan foto-foto kegiatan terkini yang dilakukan oleh ICCTF dan para mitra pelaksana.

Gambar 21. Infografis Perkembangan Akun Sosial Media ICCTF: Facebook, Twitter dan Instagram pada kuartal 1 Tahun 2023

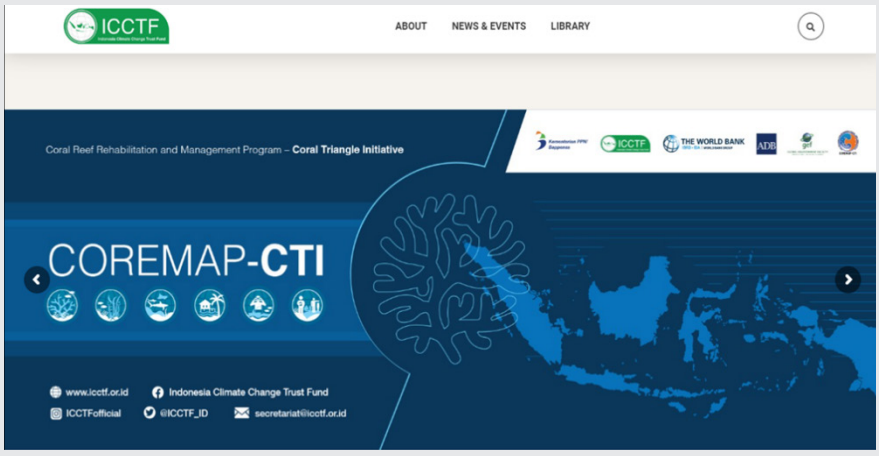

Gambar 22. Homepage Website ICCTF

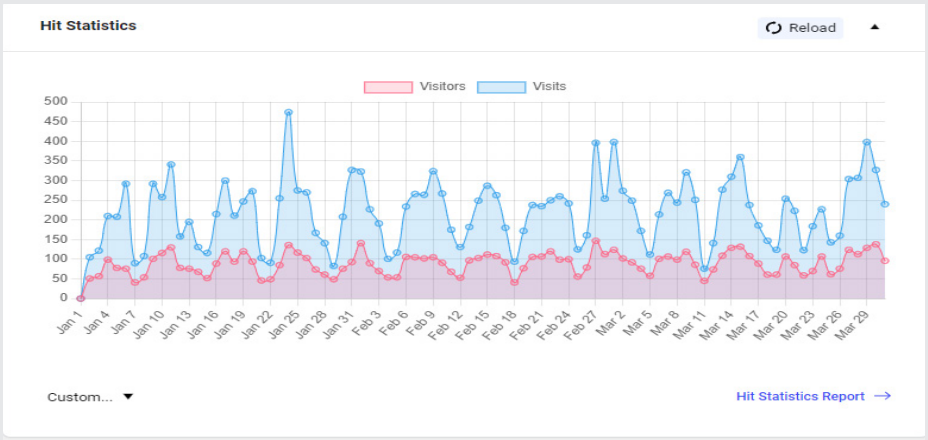

Gambar 23. Hasil Jangkauan Visit & Visitor pada Website ICCTF Kuartal 1 Tahun 2023

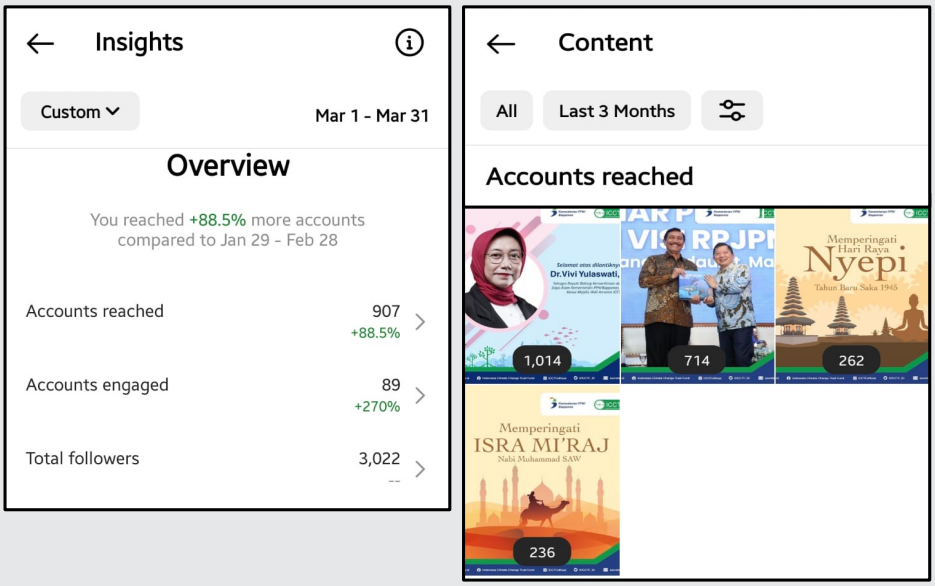

Gambar 24. Hasil Jangkauan Insights dan Content pada Akun Instagram Indonesia Climate Change Trust Fund Kuartal 1 Tahun 2023

3 AUDIT, KEUANGAN Dan OPERASIONAL

A. Audit BPK Tahun 2023

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabel, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Negara. Pada tahun 2023 ini BPK sedang mengaudit Laporan Keuangan Satuan Kerja Majelis Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran 2022 dan opini masih belum difinalkan. Sedangkan audit untuk kegiatan Hibah Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) Tahun Anggaran 2022 juga sedang diaudit oleh BPK Audit Khusus di tahun 2023 ini.

B. Informasi Keuangan Periode Januari - Maret 2023

Sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Nasional di Indonesia, ICCTF selalu memegang prinsip akuntabiltas dan transparansi dalam setiap kegiatan terkait keuangan sehingga, prinsip tata kelola organisasi dapat tercapai.

Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan semua kegiatan pelaksanaan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Pada tahun 2023 ICCTF mengelola dana Rupiah Murni APBN sebesar 12M dan dana Hibah Luar Negeri (Hibah Terencana) sebesar 14,4M sehingga total dana yang dikelola ICCTF Tahun Anggaran 2023 adalah 26,4M. Capaian pada kuartal 1 tahun 2023 adalah sebesar 1,58M yaitu 6,23% dari total dana yang dikelola (Tabel 4).

Tabel 4. Rincian alokasi dana pada Satker ICCTF Periode Januari – Maret Tahun 2023

Sumber Dana	Anggaran	Penyerapan		Sisa Anggaran
APBN - ICCTF	12.000.000.000	1.419.591.733	12%	10.580.408.267
Hibah – Asian Development Bank (Reksus)	14.400.000.000	163.880.000	1%	13.236.120.000
TOTAL	**26.400.000.000**	**1.583.471.733**	**6%**	**23.816.528.267**

C. Operasional / Kesekretariatan

Pada triwulan 1 tahun 2023, jumlah tenaga professional yang mendukung kegiatan ICCTF berjumlah 22 Orang. Penyebaran gender terdiri dari 14 jenis kelamin laki-laki dan 8 jenis kelamin perempuan sebagai berikut:

No	Nama	Posisi	Pendanaan
1	Gabriel A. Wagey	Executive Director	Rupiah Murni (APBN)
2	Mega Gusti Rama	Finance and Operation Manager	Rupiah Murni (APBN)
3	Februanty Suyatiningsih	Program Manager	Rupiah Murni (APBN)
4	Anggri Heravanthi	Accounting Specialist	Rupiah Murni (APBN)
5	Siwi Handinah	General Adm dan HR Coordinator	Rupiah Murni (APBN)
6	Muhammad Wildan Kautsar	Knowledge Management Officer	Rupiah Murni (APBN)
7	Joshua Arianto M	Program Officer	Rupiah Murni (APBN)
8	Eko Wahyudi	Finance and Administration Officer COREMAP-CTI WB	Rupiah Murni (APBN)
9	Agus Salim	Logistic and General Support	Rupiah Murni (APBN)
10	Sugihartono	Office Assistant	Rupiah Murni (APBN)
11	Muhamad Nuryanto	Database Assistant	Rupiah Murni (APBN)
12	Nur Jali	Procurement Officer	Rupiah Murni (APBN)
13	Andrian Firmansyah	Tenaga Operasional Perkantoran	Rupiah Murni (APBN)
14	Budiyanto	Pengemudi	Rupiah Murni (APBN)
15	Steven R. Limbong	PME Officer	Rupiah Murni (APBN)
16	Alya Prima Syanti	Financial Management Specialist COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
17	Leonas Chatim	Project Team Leader COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
18	Nia Kania	Administration Officer COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
19	Nanda Sachra Y	Monev Specialist COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
20	Novita Fitrianingrum	Program Officer COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
21	Lalu Alid Riadi	Site Coordinator Gili Balu	Hibah LN ADB
22	Derick Prawira	Creative Officer COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB

Kegiatan-kegiatan Sekretariat ICCTF yang dilaksanakan sepanjang triwulan 1 tahun 2023, antara lain:

a. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Lingkup Kedeputian KSDA TA 2022

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan penyusunan LKj Tahun 2022. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain, sebagai berikut:

- Tenggat waktu penyampaian draft LKj di tanggal 13 Januari 2023 dan untuk finalnya di tanggal 31 Januari 2023.
- Untuk e-performance diisi manual.
- Pastikan untuk memakai Perjanjian Kinerja (PK) terbaru yang di Bulan November 2022. Untuk PK ang belum ditandatangani silahkan dikonfirmasi ke Ortala.
- Direktorat KP menyusun dua LKj. Laporan Direktorat KP PICnya oleh Rahma, kemudian Laporan ICCTF PICnya oleh Karis. Draft telah selesai disusun.
- Di akhir Januari nanti kita akan kumpul lagi secara fisik untuk diskusi UKE II dan persiapan untuk penyusunan UKE I

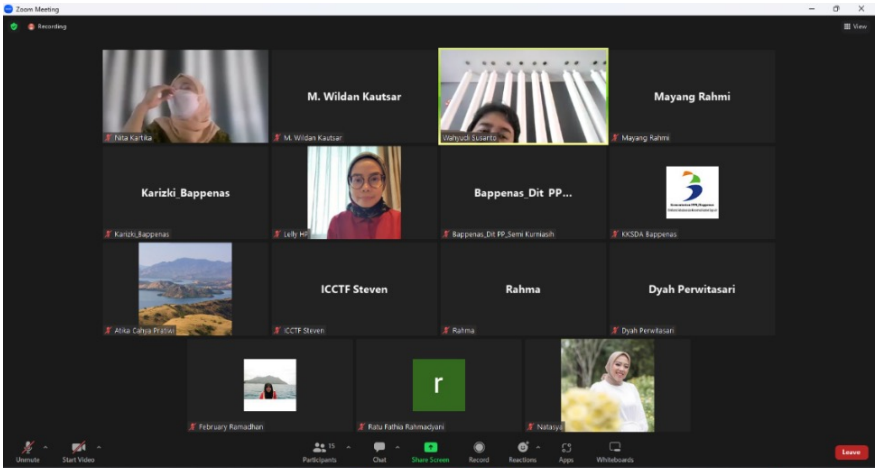

Gambar 25. Pembahasan LKJ lingkup Kedeputian KSDA

b. Undangan Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022. Agenda pertemuan ini adalah evaluasi kegiatan dan anggaran Tahun 2022 di Kementerian PPN/Bappenas. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain, sebagai berikut:

- Pengesahan hibah langsung jasa/barang minimal 1x setelah BAST ditetapkan pada tahun anggaran (catatan: terdapat 7 hibah yakni fecility, GFC, EEMRAIIS, SDGs, PCDIAII, KOMPAK, SUMPM belum ada pengesahan belanja hibah di tahun 2022).
- Rekomendasi temuan auditor eksternal agar tuntas ditindaklanjuti
- Penyampaian Project Completion report paling lama 6 bulan setelah proyek berakhir

- Rencana Tindak Lanjut:

  1. Perlengkapan pertanggungjawaban keuangan TA 2022 masing-masing PPK
  2. Pengusulan pemuntakhiran SE Sesmen tantang administrasi kegiatan dan anggaran pasca dihapusnya PPKM
  3. Knowledge sharing penyusunan HPS berbasis output untuk paket jasa konsultan perusahaan
  4. Konfirmasi paket jasa konsultan perusahaan TA 2023 pada masing masing PPK

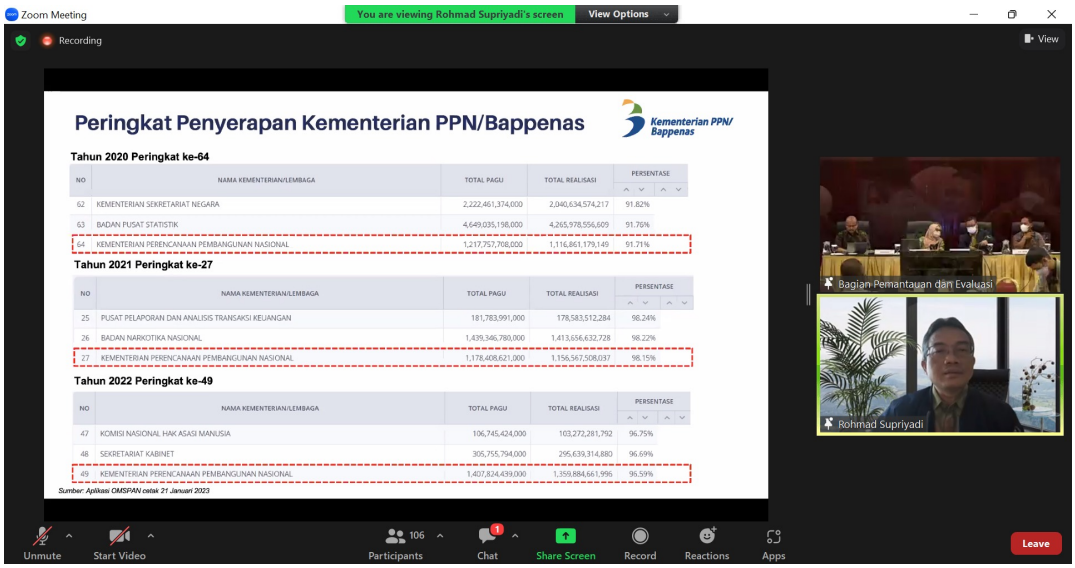

Gambar 26. Rapat evaluasi kegiatan dan anggaran Tahun 2022

c. Undangan Workshop Kompensasi atas Pelaporan Pajak Pegawai dan Penyusunan Bukti Potong SPT Tahunan 2022

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17-20 Januari 2023 di Lombok, NTB. Agenda kegiatan ini adalah pembahasan kompensasi atas pelaporan pajak pegawai dan penyusunan bukti potong SPT Tahunan 2022. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain, sebagai berikut:

- NPWP segera dilakukan validasi NIK sebelum 31 Maret 2023 karena saat tanggal 14 juli 2023 - 31 Desember 2023 NPWP format baru (NIK) masih digunakan secara terbatas pada layanan administrasi perpajakan nanti pada 1 januari 2024 NPWP format baru (NIK) diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Dan untuk NIK sudah padan dengan data Dukcapil supaya nanti NIK bisa berfungsi sebagai NPWP.
- Tetang pemontongan pph 21 pada Pemerintah, pada pajak PPH 21 ini yang dipotong dari penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi. Dan untuk orang pribadi di bagi menjadi 2 untuk subjek dalam negri merupakan pajak PPH 21 dan subjek luar negeri merukana PPH 26.

- Sesuai peraturan PER-17/PJ/2021 jika adanya keslahan atau kurangnya Bukti Pemotongan dapat dilakukan pembetulan, pembatalan ataupun penambahan. Dan jika ada kelebihan, dicari terlebih dahulu siapa yang lebih bayar dengan syarat sudah dibayarkan dan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya oleh pemotong.
- Di Satker ICCTF ada contoh terkait pembutan bukti potong, yang pertama ada pegawai yang berkerja dari Januari sampai bulan Agustus lalu di awal bulan September keluar dan masuk lagi dibulan oktober – desember. Kemudian ada karyawan yang memiliki 2 posisi jabatan dimana 3 bulan pertama gaji dibayar menggunakan Hibah lalu 6 bulan selanjutnya menggunakan RM yang dimana dikenakan PPh Pasal 21. Maka untuk pembuktian pajaknya disetahunkan terlebih dahulu akan tetapi nilai disesuaikan dengan nilai yang diterima.

Gambar 27. Pembahasan materi yang diikuti oleh peserta workshop

d. Undangan Bappenas: Peluncuran Dokumen Stranas Pengelolaan Lahan Basah

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2023 bertempat di Hotel Ayaduta, Jakarta. Agenda pertemuan ini adalah peluncuran Dokumen Stranas Pengelolaan Lahan Basah. Poin-poin penting hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia memiliki potensi penyimpanan cadangan karbon yang sangat besar, namun kondisi tutupan mangrove dan tutupan hutan pada lahan gambut terus menurun
- Untuk mendukung pencapaian target Indonesia Emas 2045 dan Pembangunan Rendah Karbon diperlukan strategi progresif dan berkelanjutan
- Pengelolaan ekosistem Lahan Basah menjadi bagian di dalam KLHS RPJN 2025-2045 sebagai isu strategis pembangunan yang berkelanjutan yang akan dianalisis pengaruhnya kedalam Kebijakan Rencana dan Program
- Kunci keberhasilan adalah kolaborasi baik di pemerintah pusat dan daerah hingga ke masyarakat
- Proses penyusunan dokumen Stranas Pengelolaan Lahan Basah telah dimulai sejak Februari 2021 dan bertepatan dengan peringatan Hari Lahan Basah Sedunia, dokumen ini diluncurkan.

Gambar 26. Rapat evaluasi kegiatan dan anggaran Tahun 2022

e. Diskusi dan Konfirmasi terkait PHLN ADB dan WB Kementerian PPN/Bappenas

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2023 secara online melalui aplikasi Zoom. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan mengenai PHLN COREMAP-CTI ADB dan WB. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain, sebagai berikut:

- Tahun 2022, ada 2 hibah yakni WB dan ADB
- Implementasi kegiatan dilaksanakan bersama dengan beberapa mitra. Kegiatannya sebgaian besar adalah pemberdayaan masyarakat pesisir, dalam bentuk penyiapan kelompok masyarakat pengawasan, pelatihan untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat, selain itu juga beberapa bantuan untuk pembangunan infrastruktur yang dijadikan sebagai pendukung ekowisata.
- ADB pada tahun 2023 ini hampir 100% selesai dan akan dilakukan serah terima. Sedangkan untuk WB sudah selesai di tahun 2022.
- Perlu disiapkan dokumen-dokumen seperti amandement agreement, POM, output (laporan-laporan) dan sebagainya untuk disampaikan kepada BPK.
- Site visit direncanakan pada tanggal 27 februari – 10 Maret 2023

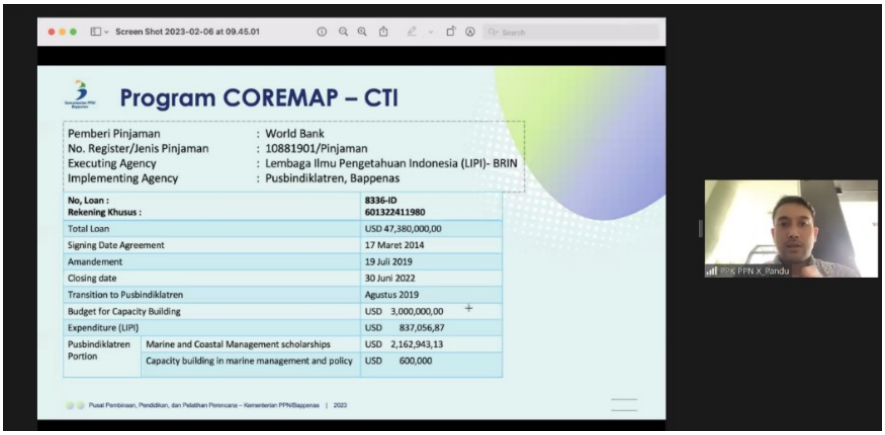

Gambar 29. Pembahasan COREMAP-CTI di dalam rapat

f. Diskusi tindak lanjut laporan pengaduan LSM

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2023 secara online melalui aplikasi Zoom. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan strategi untuk menanggapi 15 laporan pengaduan dari LSM Pemantau TIPIKOR. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain, sebagai berikut:

- Materi pengaduan berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas dan laporan keuangan hibah tahun 2018 – 2021
- Terdapat 15 surat pengaduan yang bersifat potensi kerugian negara
- Pengaduan ini akan direspon, tapi perlu disusun terlebih dahulu (secara umum)
- Untuk selanjutnya proses akan dilakukan dengan menggunakan Kepmen tahun 2003, dalam periode singkat, karena hal ini sudah ada diskusi dengan BPK.
- Akan disampaikan laporan kepada Sestama dan Menteri

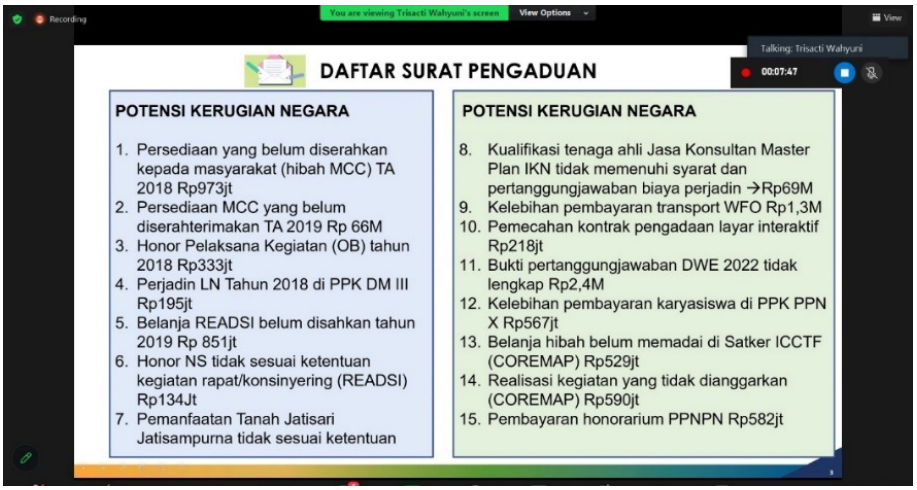

Gambar 30. Paparan daftar surat pengaduan LSM

g. FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2022 dan Arah Kebijakan IKPA 2023

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2023 secara online melalui aplikasi Zoom. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan evaluasi pelaksanaan angaaran 2022 dn arah kebijakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2023. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain, sebagai berikut:

- UP PNPB tidak termasuk dalam penghitungan penilaian IKPA. Satker terlebih dulu harus mengajukan UP, setelah itu dapat mengajukan TUP
- SPM GUP/TUP diajukan di dalam 1 tanda terima (1 kali OTP misalnya untuk 10 SPM) untuk mencegah keterlambatan pencairan SP2D karena berdasarkan antrian
- Akselerasi penyelesaian tagihan berdasarkan tanggal BASTnya
- Sesuai Surat yang telah dikirimkan dari KPPN Jakarta II terkait jadwal pemutakhiran Halaman 3 DIPA maka penilaian IKPA dihitung berdasarkan tanggal posting bukan tanggal pengajuannya

- Pengajuan SPM dihindari di akhir bulan, terutama SPM LS maka otomatis pencairannya di bulan berikutnya sehingga dihitung keterlambatan pada RPDnya
- Revisi Deviasi Halaman 3 DIPA dapat dikoordinasikan dengan DJPb Kanwil DKI Jakarta, pemutakhiran dapat direvisi untuk periode 3 bulan terakhir

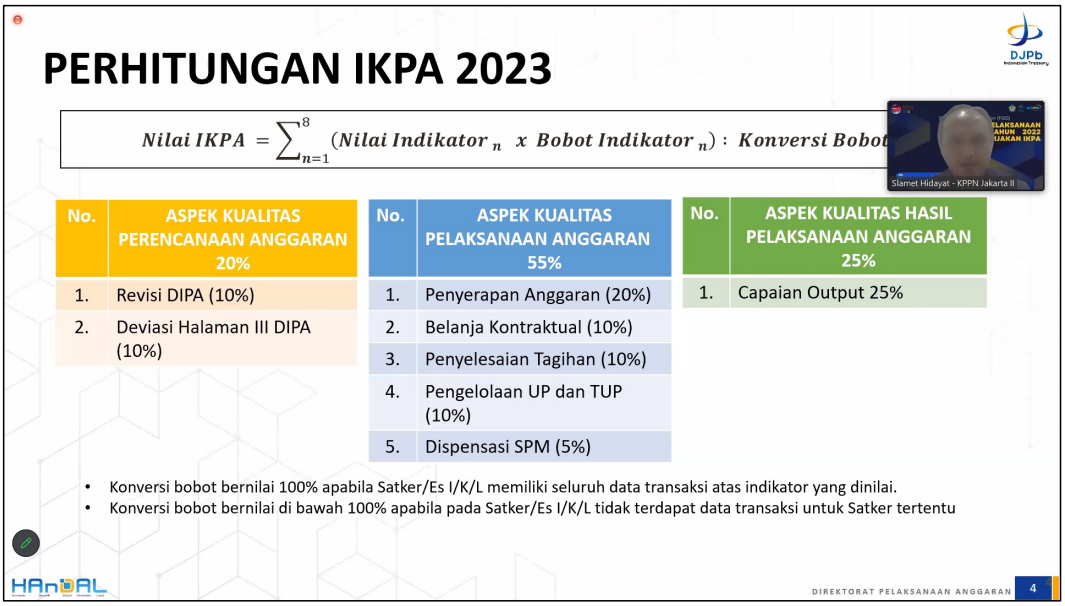

Gambar 31. Pemaparan materi IKPA oleh Narasumber

h. Undangan Forum PPK

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2023 di Hotel Golden City, Semarang. Agenda pertemuan ini adalah diskusi terkait PPK dan Unit Kerja . Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Penyerapan akhir tahun 2022 96,62% namun masih dibawah target 98,15%
- Alokasi anggaran 2023, berdasarkan jenis belanja:
  1. Belanja pegawai 248.831.306.000 (diblokir 24.109.084.00)
  2. Belanja modal 73.197.216.000 (diblokir 587.749.999)
  3. Belanja barang 1.265.303.244.000 (diblokir 84.978.195.000)
- Forum PPK ini diharapkan dapat memberikan referensi atas keputusan yang harus dibuat oleh eselon 1 dan 2 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PPK dan UKE kedepan. Menjadi catatan kepada bagian IBAU, UMUM dan ORTALA agar dapat kita sepakati kedepan hasil keputusan yang didapat dari Forum PPK
- Permasalahan yang di bahas pada forum PPK adalah permasalahan yang sama dan berulang setiap tahunnya. Para PPK diharapkan dapat mengupdate aturan berjalan

- Teman-teman PPK akan ada kegiatan sesi ke 2 untuk forum desk PPK bersama dengan UKE untuk berdiskusi lebih dalam kembali
- Untuk Satker ICCTF pemenuhan ATKnya disetujui oleh Karo Umum tidak berasal dari Biro Umum sebab adanya kebutuhan dalam keaktivan marketplace digipay dari Kemenkeu
- Nanti akan ada edaran terkait kesepakatan dari Forum PPK yang akan di edarkan kepada seluruh PPK dan UKE

Gambar 32. Penyampaian materi oleh Narasumber

i. **Undangan Sosialisasi Penerapan Kearsipan Berbasis Elektronik Modul SRIKANDI**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2023 bertempat di Hotel Ashley, Jakarta. Agenda pertemuan ini adalah sosialisasi tata kelola kearsipan melalui aplikasi SRIKANDI. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020, Aplikasi SRIKANDI ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang berlaku secara nasional dan pimpinan instansi pusat dan daerah wajib menggunakannya.
- SRIKANDI diharapkan dapat mewujudkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kearsipan nasional khususnya dalam bidang pengembangan dan optimalisasi tata kelola persuratan dan kearsipan dinamis.
- Proses bisnis penciptaan naskah dinas meliputi pembuatan naskah dinas yang dilakukan oleh konseptor, verifikasi draf yang telah dibuat konseptor, penandatangan secara elektronik, memberikan nomor sebelum proses pengiriman naskah dinas serta mengirimkan naskah dinas baik naskah dinas untuk internal maupun eksternal.
- Aplikasi SRIKANDI dapat diakes melalui alamat https://srikandi.arsip.go.id
- Posisi Admin Nasional dalam aplikasi SRIKANDI berada di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- Admin Instansi berada pada Unit Kearsipan atau Unit Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)

LAPORAN TRIWULAN 1 2023

Kementerian PPN/ Bappenas

ICCTF
Indonesia Climate Change Trust Fund